

## **BUPATI KATINGAN**

### **PERATURAN BUPATI KATINGAN**

**NOMOR 36 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
DAN PROGNOSIS 6 (ENAM) BULAN BERIKUTNYA  
TAHUN ANGGARAN 2011**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KATINGAN**

- Menimbang :
- a. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 58 ayat 1 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180 );
  3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Nomor 4250);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4389);
  7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4884);

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5074);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
26. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 3);
27. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011 Nomor 1);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
30. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011 Nomor 1);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN PROGNOSIS 6 (ENAM) BULAN BERIKUTNYA TAHUN ANGGARAN 2011**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Katingan;
5. Laporan Semester adalah Laporan realisasi dari bulan Januari 2011 sampai dengan Juni 2011 yang disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintah yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan;
6. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Katingan.

**BAB II**  
**REALISASI ANGGARAN**  
**Pasal 2**

Laporan Realisasi Anggaran semester I tahun anggaran 2011 terdiri dari :

1. Pendapatan			
a. Pendapatan Asli Daerah		10.307.748.305,30	
b. Dana Perimbangan		300.979.515.885,00	
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah		3.465.881.290,00	
	Jumlah Pendapatan		314.753.145.480,30
2. Belanja			
a. Belanja Tidak Langsung			
1) Belanja Pegawai	105.920.612.321,00		
2) Belanja Bunga	0,00		
3) Belanja Subsidi	0,00		
4) Belanja Hibah	9.140.000.000,00		
5) Belanja Bantuan Sosial	275.000.000,00		
6) Belanja Bagi Hasil	0,00		
7) Belanja Bantuan Keuangan	3.039.717.000,00		
8) Belanja Tidak Terduga	0,00		
			118.375.329.321,00
b. Belanja Langsung			
1) Belanja Pegawai	9.084.561.694,00		
2) Belanja Barang dan Jasa	18.371.371.201,00		
3) Belanja Modal	20.511.089.100,00		
			47.967.021.995,00
	Jumlah Belanja		166.342.351.316,00

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan Pembiayaan	162.153.387,37	
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>2.500.000.000,00</u>	
Jumlah Pembiayaan Neto		<u>159.653.387.783,37</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan		308.064.181.947,67

**Pasal 3**

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) semester I tahun anggaran 2011 sebesar Rp. 308.064.181.947,67 terdiri dari :

a. Kas pada kas daerah	Rp. 302.418.046.064,67
b. Kas pada bendahara pengeluaran	<u>Rp. 5.646.135.883,00</u>
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	Rp. 308.064.181.947,67

**Pasal 4**

Prognosis 6 (enam) bulan berikutnya tahun anggaran 2011 terdiri dari :

1. Pendapatan		
a. Pendapatan Asli Daerah	15.236.338.336,30	
b. Dana Perimbangan	253.457.968.611,00	
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah	<u>13.075.547.572,00</u>	
Jumlah Pendapatan		281.769.854.519,30

2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung			
1) Belanja Pegawai	121.857.648,036,00		
2) Belanja Bunga	0,00		
3) Belanja Subsidi	0,00		
4) Belanja Hibah	4.907.039.863,00		
5) Belanja Bantuan Sosial	3.405.810.000,00		
6) Belanja Bagi Hasil	1.400.000.000,00		
7) Belanja Bantuan Keuangan	14.532.283.000,00		
8) Belanja Tidak Terduga	2.083.693.430,00		
			148.186.474.329,00

b. Belanja Langsung			
1) Belanja Pegawai	28.237.175.976,00		
2) Belanja Barang dan Jasa	205.321.514.113,05		
3) Belanja Modal	203.824.149.808,95		
		437.382.839.898,00	
Jumlah Belanja		585.569.314.227,00	

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan Pembiayaan	1.117.572.197,53		
b. Pengeluaran Pembiayaan	3.250.000.000,00		
		(2.132.427.802,47)	
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan		(305.931.887.510,17)	

**Pasal 5**

Ringkasan laporan realisasi anggaran semester I (pertama) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati Katingan ini.

**Pasal 6**

Ringkasan laporan realisasi anggaran semester I (pertama) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

**Pasal 7**

Ringkasan laporan realisasi semester I (pertama) dan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati Katingan ini.

## PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN

## RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

SEMESTER I PER 30 JUNI 2011 TAHUN ANGGARAN 2011

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)			Bertambah / (Berkurang) (Rp)	%
		Anggaran	Realisasi	%		
1		3	4	5	6	
1.	PENDAPATAN DAERAH	583.648.710,368,00	314.753.145.480,30	(268.895.564.877,70)	53,93	
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	24.865.000.000,00	10.307.748.305,30	(14.557.251.694,70)	41,45	
1.1.1	Pajak Daerah	1.758.221.084,00	1.172.634.360,00	(585.586.724,00)	66,69	
1.1.2	Restribusi Daerah	3.459.051.760,00	1.780.427.950,38	(1.678.623.809,62)	51,47	
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	2.600.000.000,00	2.352.350.175,46	(247.649.824,54)	90,48	
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	17.047.727.156,00	5.002.335.819,46	(12.045.391.336,54)	29,34	
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	542.242.281.496,00	300.979.515.885,00	(241.262.765.611,00)	55,61	
1.2.1	Transper Pemerintah Pusat, Dana Perimbangan	542.242.281.496,00	294.881.913.885,00	(247.360.367.611,00)	54,38	
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	34.864.797.600,00	4.131.499.255,00	(30.733.298.345,00)	11,85	
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak ( Sumber Daya Alam )	34.755.383.896,00	21.941.542.630,00	(12.813.841.266,00)	63,13	
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	449.170.000.000,00	261.786.112.000,00	(187.383.888.000,00)	58,28	
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	23.415.100.000,00	7.022.760.000,00	(16.392.340.000,00)	29,99	
1.2.1.5	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	37.000.000,00	0,00	(37.000.000,00)	0,00	
1.2.2	Transper Pemerintah Lainnya	0,00	6.097.602.000,00	6.097.602.000,00	0,00	
1.2.2.1	Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.2	Dana Penyesuaian	0,00	6.097.602.000,00	6.097.602.000,00	0,00	
1.2.3	Transper Pemerintah Propinsi	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.3.2	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	

(dalam rupiah)

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1.3	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	16.541.428.862,00	3.465.881.290,00	(13.075.547.572,00)	20,95
1.3.1	Pendapatan Hibah	4.160.000.000,00	1.990.235.348,00	(2.169.764.652,00)	47,84
1.3.2	Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Pendapatan Lainnya	12.381.428.862,00	1.475.645.942,00	(10.905.782.920,00)	11,92
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>683.648.710.358,00</b>	<b>314.753.145.480,30</b>	<b>(268.895.564.877,70)</b>	<b>53,93</b>
2.	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>709.086.710.358,00</b>	<b>166.342.351.316,00</b>	<b>(542.744.359.042,00)</b>	<b>23,46</b>
2.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>254.645.755.076,00</b>	<b>118.375.329.321,00</b>	<b>(136.270.425.755,00)</b>	<b>46,49</b>
2.1.1	Belanja Pegawai	218.121.795.453,00	105.920.612.321,00	(112.201.183.132,00)	48,56
2.1.2	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Belanja Hibah	11.684.957.123,00	9.140.000.000,00	(2.544.957.123,00)	78,22
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	3.605.810.000,00	275.000.000,00	(3.330.810.000,00)	7,63
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kab./Kota dan Pemerintahan Desa	1.400.000.000,00	0,00	(1.400.000.000,00)	0,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab./Kota dan Pemerintahan Desa	17.527.000.000,00	3.039.717.000,00	(14.487.283.000,00)	17,34
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	2.306.192.500,00	0,00	(2.306.192.500,00)	0,00
2.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>454.440.955.282,00</b>	<b>47.967.021.995,00</b>	<b>(406.473.933.287,00)</b>	<b>10,56</b>
2.2.1	Belanja Pegawai	32.764.452.264,00	9.084.561.694,00	(23.679.890.570,00)	27,73
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	207.618.072.210,05	18.371.371.201,00	(189.246.701.009,05)	8,85
2.2.3	Belanja Modal	214.058.430.807,95	20.511.089.100,00	(193.547.341.707,95)	9,59
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>709.086.710.358,00</b>	<b>166.342.351.316,00</b>	<b>(542.744.359.042,00)</b>	<b>23,46</b>
	<b>Surplus/(Defisit)</b>	<b>(125.438.000.000,00)</b>	<b>148.410.794.164,30</b>	<b>273.848.794.164,30</b>	<b>(118,31)</b>

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang) (Rp)	%
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5	6
3.	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	125.438.000,00	159.653.387,783,37	34.215.387,783,37	127,28
3.1	<b>PENERIMAAN DAERAH</b>	131.188.000,00	162.153.387,783,37	30.965.387,783,37	123,60
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	131.188.000,00	161.049.355,615,40	29.861.355,615,40	122,76
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4	Penerimaan Pembiayaan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	1.104.032.167,97	1.104.032.167,97	0,00
	<b>JUMLAH PENERIMAAN DAERAH</b>	131.188.000,00	162.153.387,783,37	30.965.387,783,37	123,60
3.2	<b>PENGELUARAN DAERAH</b>	5.750.000,00	2.500.000,00	(3.250.000,00)	43,48
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.750.000,00	2.500.000,00	(3.250.000,00)	43,48
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>JUMLAH PENGELUARAN DAERAH</b>	5.750.000,00	2.500.000,00	(3.250.000,00)	43,48
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	125.438.000,00	159.653.387,783,37	34.215.387,783,37	127,28
3.3	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)</b>	0,00	308.064.181.947,67	308.064.181.947,67	0,00

Kasongan, 30 Juni 2011

BUPATI KATINGAN



**DUWEL RAWING**

PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN  
RINGKASAN LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
DAN PROGNOSIS 6 (ENAM) BULAN BERIKUTNYA  
TAHUN ANGGARAN 2011

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI

NOMOR :

TANGGAL :

1	2	3	4	5	6	7
Nomor Urut	Uraian	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran s/d Semester Pertama	Prognosis	Keterangan
1.	PENDAPATAN DAERAH	583.648.710.358,00	314.753.145.480,30	268.895.564.877,70	281.769.854.519,30	
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	24.865.000.000,00	10.307.748.305,30	14.557.251.694,70	15.236.338.336,30	
1.1.1	Pajak Daerah	1.758.221.084,00	1.172.634.360,00	585.586.724,00	890.586.724,23	
1.1.2	Restribusi Daerah	3.459.051.760,00	1.780.427.950,38	1.678.623.809,62	1.996.210.451,62	
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	2.600.000.000,00	2.362.350.175,46	247.649.824,54	247.649.824,54	
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	17.047.727.156,00	5.002.335.819,46	12.045.391.336,54	12.101.891.335,91	
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	542.242.281.496,00	300.979.515.885,00	241.262.765.611,00	253.457.968.611,00	
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat, Dana Perimbangan	542.242.281.496,00	294.881.913.885,00	247.360.367.611,00	247.360.367.611,00	
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	34.864.797.600,00	4.131.499.255,00	30.733.298.345,00	30.733.298.345,00	
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak ( Sumber Daya Alam )	34.755.383.896,00	21.941.542.630,00	12.813.841.266,00	12.813.841.266,00	
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	449.170.000.000,00	261.786.112.000,00	187.383.888.000,00	187.383.888.000,00	
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	23.415.100.000,00	7.022.760.000,00	16.392.340.000,00	16.392.340.000,00	
1.2.1.5	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	37.000.000,00	0,00	37.000.000,00	37.000.000,00	
1.2.2	Transfer Pemerintah Lainnya	0,00	6.097.602.000,00	(6.097.602.000,00)	6.097.601.000,00	
1.2.2.1	Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.2	Dana Penyesuaian	0,00	6.097.602.000,00	(6.097.602.000,00)	6.097.601.000,00	
1.2.3	Transfer Pemerintah Propinsi	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.3.2	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	

(dalam rupiah)

Nomor Urut	Uraian	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran s/d Semester Pertama	Prognosis	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1.3	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	16.541.428.862,00	3.465.881.290,00	13.075.547.572,00	13.075.547.572,00	
1.3.1	Pendapatan Hibah	4.160.000.000,00	1.990.235.348,00	2.169.764.652,00	2.169.764.652,00	
1.3.2	Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.3	Pendapatan Lainnya	12.381.428.862,00	1.475.645.942,00	10.905.782.920,00	10.905.782.920,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>583.648.710.358,00</b>	<b>314.753.145.480,30</b>	<b>268.895.564.877,70</b>	<b>281.769.854.519,30</b>	
2.	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>709.086.710.358,00</b>	<b>166.342.351.316,00</b>	<b>542.744.359.042,00</b>	<b>585.569.314.227,00</b>	
2.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>254.645.755.076,00</b>	<b>118.375.329.321,00</b>	<b>136.270.425.755,00</b>	<b>148.186.474.329,00</b>	
2.1.1	Belanja Pegawai	218.121.795.453,00	105.920.612.321,00	112.201.183.132,00	121.857.648.036,00	
2.1.2	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.4	Belanja Hibah	11.684.957.123,00	9.140.000.000,00	2.544.957.123,00	4.907.039.863,00	
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	3.605.810.000,00	275.000.000,00	3.330.810.000,00	3.405.810.000,00	
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kab./Kota dan Pemerintahan Desa	1.400.000.000,00	0,00	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab./Kota dan Pemerintahan Desa	17.527.000.000,00	3.039.717.000,00	14.487.283.000,00	14.532.283.000,00	
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	2.306.192.500,00	0,00	2.306.192.500,00	2.083.693.430,00	
2.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>454.440.955.282,00</b>	<b>47.967.021.995,00</b>	<b>406.473.933.287,00</b>	<b>437.382.839.898,00</b>	
2.2.1	Belanja Pegawai	32.764.452.264,00	9.084.561.694,00	23.679.890.570,00	28.237.175.976,00	
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	207.618.072.210,05	18.371.371.201,00	189.246.701.009,05	205.321.514.113,05	
2.2.3	Belanja Modal	214.058.430.807,95	20.511.089.100,00	193.547.341.707,95	203.824.149.808,95	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>709.086.710.358,00</b>	<b>166.342.351.316,00</b>	<b>542.744.359.042,00</b>	<b>585.569.314.227,00</b>	
	<b>Surplus/(Defisit)</b>	<b>(125.438.000.000,00)</b>	<b>148.410.794.164,30</b>	<b>(273.848.794.164,30)</b>	<b>(303.799.459.707,70)</b>	

Nomor Urut	Uraian	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran s/d Semester Pertama	Prognosis	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
3.	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	125.438.000,00,00	159.653.387.783,37	(34.215.387.783,37)	(2.132.427.802,47)	
3.1	<b>PENERIMAAN DAERAH</b>	131.188.000,00,00	162.153.387.783,37	(30.965.387.783,37)	1.117.572.187,53	
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	131.188.000,00,00	161.049.355.615,40	(29.861.355.615,40)	89.309.928,00	
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.4	Penerimaan Pembayaran Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.5	Penerimaan Kembali Pembiayaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	1.104.032.167,97	(1.104.032.167,97)	1.028.262.269,53	
	<b>Jumlah Penerimaan Daerah</b>	131.188.000,00,00	162.153.387.783,37	(30.965.387.783,37)	1.117.572.187,53	
3.2	<b>PENGELUARAN DAERAH</b>	5.750.000,00,00	2.500.000,00,00	3.250.000,00,00	3.250.000,00,00	
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.750.000,00,00	2.500.000,00,00	3.250.000,00,00	3.250.000,00,00	
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Jumlah Pengeluaran Daerah</b>	5.750.000,00,00	2.500.000,00,00	3.250.000,00,00	3.250.000,00,00	
	<b>Pembayaran Netto</b>	125.438.000,00,00	159.653.387.783,37	(34.215.387.783,37)	(2.132.427.802,47)	
3.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	0,00	308.064.181.947,67	(308.064.181.947,67)	(305.931.887.510,17)	

Kasongan, 30 Juni 2011

BUPATI KATINGAN

  
**DUWEL RAWING**

**Pasal 8**

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 7 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Katingan ini.

**BAB III**

**P E N U T U P**

**Pasal 9**

Peraturan Bupati Katingan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan  
pada tanggal, 31 Oktober 2011

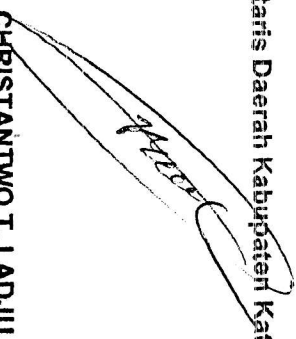
**BUPATI KATINGAN**



**DUWEL RAWING**

Diundangkan di Kasongan  
pada tanggal, 31 Oktober 2011

**Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan**



**CHRISTANTWO T. LADJU**